

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law & State*. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, 2006.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan dan Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit PT Alumni, 2000.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*. Cetakan I. Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2019.
- . *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Diedit oleh Kedua. Yogyakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta, 2007.
- Mulyana, Sumanti Disca F dan Titis Lintang. *Dalam Mengadili Perkara Apakah Hakim Seharusnya Memprioritaskan Penerapan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi*. Jakarta: Perkembangan Hukum di Indonesia Tinjauan Retrospeksi dan Prospektif Dalam Rangka 70 Tahun Prof. Dr. Mieke Komar, S.H, 2012.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Simabura, Charles. *Peraturan Menteri Dalam Praktik Sistem Presidensial Setelah Perubahan UUD NRI 1945*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022.
- Soebechi, Imam. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2012.

Jurnal Nasional

- Irfani, Nurfaqih. “Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, No. 3 (2020).
- Nugraha, Dwi Putra. “Memaknai (Kembali) Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia.” *Law Review* XII, No. 3 (n.d.).
[http://repository.ubharajaya.ac.id/6757/1/LAW REVIEW VOL 3 NO 3 UPH](http://repository.ubharajaya.ac.id/6757/1/LAW%20REVIEW%20VOL%203%20NO%203%20UPH)

2013.pdf#page=25.

Titis Anindyajati, Et.al. "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Keistimewaan Aceh." *Jurnal Konstitusi* 18 (2021): 669.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1838>.

Hasil Penelitian

Yusviando, Natanael. "Pengesampingan Asas Hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori dalam Kegiatan Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia Pada Tahun 2017 (Pertentangan Penerapan Sistem Gross Split dengan Sistem Cost Recovery dalam Kontrak Bagi Hasil)". Skripsi, Tangerang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2018.

Simabura, Charles. "Wewenang Menteri Membentuk Peraturan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Kurun Waktu Tahun 2004-2019". Disertasi, Jakarta: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

UU No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3986)

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234)

Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4061)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 467/B/PK/Pjk/2022 tanggal 1 Maret 2022.

Website/Internet

Mahendra, A.A. Oka. "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan." https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harmonisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180, diakses pada 1 Agustus 2022.

Lakonawa, Shidarta dan Petrus. “Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan Penggunaannya.” <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-general/> diakses pada 18 September 2022.

Pajak, Online. “Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Apa Itu?” <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn>, diakses pada 2 Oktober 2022.

“Apa Itu Teori Hukum Stufenbau?” *Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area* <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-teori-hukum-stufenbau/>, diakses pada 22 September 2022.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Ahmad Redi, akademisi Ilmu Peraturan Perundang-undangan, Zoom Meeting, Tanggal 25 Oktober 2022, Pukul 09.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Roberia, Direktur Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I pada Kementerian Hukum dan HAM, Zoom Meeting, Tanggal 18 Oktober, Pukul 07.00 WIB.

